**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN MELALUI PENGOLAHAN IKAN LAUT DI KECAMATAN KAMPUNG MELAYU OLEH DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU**

**DEBBY TRI JULIANTI NAINGGOLAN**

*Program Studi Pembangunan dan Pemberdayaan, Fakultas Politik Pemerintahan*

*Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor-Jawa Barat, Indonesia*

*Email:* [*debbynainggolan6@gmail.com*](mailto:debbynainggolan6@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pemberdayaan masyaraat nelayan yang dilakukan pemerintah dalam pengolahan ikan laut di Kota Bengkulu di Kecamatan Kampung Melayu. Potensi hasil tangkap ikan laut di Kota Bengkulu cukup besar namun belum diolah oleh UMKM. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data mengunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pengolahan ikan laut di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu belum optimal dikarenakan beberapa faktor seperti masih kurangnya teknik dan pengetahuan masyarakat nelayan dalam pengolahan ikan laut, teknologi yang digunakan masih tradisional. dan yang terpenting untuk dikembangkan yaitu sumber daya manusia agar dapat berinovasi dan berkreasi dalam usaha pengolahan ikan laut.

Berdasarkan penelitian ini, penulis memberikan saran seperti: Pertama, perlu mengoptimalkan kegiatan pelatihan serta penyuluhan terhadap masyarakat pengolah ikan laut agar dapat meningkatkan teknik serta pengetahuan secara modern dalam mengolah ikan laut yang baik dan benar. Kedua, perlu adanya teknologi yang modern agar proses pengolahan ikan asin lebih efisien dan efektif.

**Kata Kunci : Pemberdayaan, Masyarakat Nelayan**

***ABSTRACT***

*This study aims to obtain a picture of community empowerment of coastal communities in the processing of marine fish in the city of Bengkulu in Kampung Melayu District. The potential for marine fishing in Bengkulu City is quite large but has not been utilizied by UMKM.This research uses descriptive method with kualitative approach. Data collection techniques use observation, interviews, and documentation.*

*Based on the observations, the empowerment of fishing communities through processing marrine in Kampung Melayu District of Bengkulu City still not optimal because the factors such as the lack of techniques and knowledge of coastal communities in the processing of salted fish, The technology use disstill traditional, and the most important thing to be developed is human resources to be able to innovate and be creative.*

*Based on observations, the conclusion of the authors provide suggestions such as: First, need to optimize training activities and extension of salted fish processing community, in order to improve technique and knowledge in modern processing salted fish is good and correct. Second, the need for modern technology to make the process of salted fish more efficient and effective.*

**Keywords: Empowerment, Fishing Communities**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Indonesia mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah. Hal ini dibuktikan dari geografis Indonesia yang sangat strategis dengan diapit oleh dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudra Pasifik serta dua benua yaitu Benua Australia dan Benua Asia. Dengan letak yang sangat strategis itu, Indonesia menjadi pusat jalur lalu lintas dunia. Selain itu, indonesia juga memiliki kekayaan flora dan fauna laut yang sangat melimpah. Potensi kekayaan laut yang sangat melimpah tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan Negara. [[1]](#footnote-1)

Namun, Negara Indonesia mempunyai masalah sosial yaitu kesejahteraan masyarakat yang bertolak belakang dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Rendahnya kesejahteraan masyarakat disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia. Masalah sosial tersebut dapat diupayakan melalui pemberdayaan masyarakat. Instansi pemerintah sudah membentuk lembaga pemberdayaan baik di pusat maupun daerah, akan tetapi masih banyak program yang tidak berpihak kepada masyarakat.

Indonesia ialah negara yang menganut sistem Otonomi Daerah. Otonomi Daerah dilakukan untuk mengurangi pekerjaan pemerintah pusat. Selain itu, agar setiap daerah melakukan pembangunan berdasarkan potensi dan sumber daya yang ada di daerah tersebut untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat ini pada dasarnya tidak dapat dinilai hanya dengan keberhasilan pemberian otonomi daerah yang luas pada derah melainkan bagaimana setiap daerah mampu dan dapat memanfaatkan serta mengolah seluruh potensi sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun alam dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat. [[2]](#footnote-2)

Peningkatan kesejahteraan juga tidak terlepas dari upaya Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakatnya. Sesuai dengan Visi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yaitu terwujudnya Kesejahteraan Rakyat Melalui Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Secara Nasional, peran-peran dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada data Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah mengalami masalah yaitu, Sumber Daya Manusia, Pembiayaan, Pemasaran, Manajemen dan Teknologi, serta Kelembagaan.[[3]](#footnote-3) Peran tersebut belum dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang mengeluh dengan kebijakan yang dibuat dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Misalnya, bantuan sumber modal yang salah sasaran, bantuan alat-alat produksi yang kurang memadai, dan perizinan yang rumit.[[4]](#footnote-4)

Berdasarkan potensi yang dimiliki oleh Kota Bengkulu, maka banyak masyarakat yang memanfaatkan potensi tersebut salah satunya sebagai nelayan..[[5]](#footnote-5) Karakteristik masyarakat nelayan sendiri sangatlah berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat yang berdomisili di wilayah daratan. Struktur masyarakatnya pun bersifat heterogen, mempunyai semangat juang yang tinggi serta solidaritas antar sesama yang kuat. Walaupun demikian, kemiskinan masih saja membelenggu pada sebagian masyarakat pesisir, sehingga hal tersebut terlihat buruk di tengah-tengah kekayaan sumber daya laut yang berlimpah. [[6]](#footnote-6)

Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia harus dimanfaatkan untuk pengembangan perekonomian di Kota Bengkulu. Selain itu, otonomi daerah memberikan wewenang pada daerah Kota Bengkulu dalam pengembangan sumber daya pesisir dan lautan. Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004, Provinsi diberikan wewenang pengolaan sejauh 12 mil laut, dan Kabupaten/Kota 1/3 dari kewenangan Provinsi. Dengan bertambahnya wewenang tersebut dapat menjadi peluang untuk Kota Bengkulu dalam rangka mempercepat pembangunan daerah dengan menggali potensi sumber daya pesisir.[[7]](#footnote-7)

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus berperan aktif. Dengan segala kewenangannya untuk memberdayakan nelayan dalam hal peningkatan pendapatan masyarakat nelayan melalui pengolahan ikan laut sehingga tercapainya tujuan untuk mensejahterahkan rakyatnya.

Tabel 1.1 menunjukkan produksi perikanan tangkap Kota Bengkulu tahun 2013-2017.

Tabel 1.1

Potensi dan Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap

Kota Bengkulu Tahun 2013-2017

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TAHUN | POTENSI (TON) | PRODUKSI (TON) |
| 2013 | 80.072 | 25.536 |
| 2014 | 80.072 | 30.076 |
| 2015 | 80.072 | 24.243,50 |
| 2016 | 80.072 | 28.667,45 |
| 2017 | 80.072 | 29.552 |

*Sumber: Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Bengkulu 2017*

Data tersebut menunjukan bahwa potensi kelautan yang cukup besar. Potensi kelautan yang besar seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya. Namun pada kenyataanya kesejahteraan masyarakat sekitarnya tidak sebanding dengan potensi yang ada. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM pada Kota Bengkulu pada tahun 2017 yaitu 78,82[[8]](#footnote-8) namun pada Kecamatan Kampung Melayu banyak masyarakat nelayan yang kurang berdaya. Hal itu dibuktikan dari tingkat IPM Kecamatan Kampung Melayu hanya 23% dari tingkat IPM Kota Bengkulu atau 29,56[[9]](#footnote-9).

Banyak masyarakat nelayan yang kurang memiliki kemampuan untuk mengolah ikan laut. Kebanyakan yang disebabkan oleh kekurangan modal, pungutan liar, serta kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak dengan nelayan.[[10]](#footnote-10) Pada Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, adalah daerah pesisir. Masyarakat di daerah tersebut sebagian besar bergantung pada hasil tangkapan dari nelayan. Hasil dari nelayan tersebut kemudian diolah agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Biasanya, yang mengolah ikan hasil tangkapan tersebut adalah anggota keluarga nelayan itu sendiri.

Nelayan juga terkadang tidak mempunyai akses modal dan akses teknologi yang mencukupi, sehingga untuk mengembangkan usaha mereka mengalami kesulitan. Upaya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk meningkatkan ekonomi dan taraf hidup masyarakat nelayan adalah pemberdayaan dengan meningkatkan bantuan sumber daya modal.

Pemberdayaan berjalan apabila dari pihak masyarakat juga berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan. Sebab jika tidak, pemerintah mengalami kendala. Oleh karena itu, pemerintah harus menyusun strategi pemberdayaan agar masyarakat terdorong untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di setiap daerah.

Berdasarkan penjelasaan di atas, peneliti tertarik untuk melakukaan penelitiann dengan judul **“Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Pengolahan Ikan Laut di Kecamatan Kampung Melayu oleh Dinas Kooperasi dan Usaha Keecil Menengah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu”**

1. **Ruang Lingkup, Fokus dan Lokasi Magang**

**1. Ruang Lingkup Magang**

Lingkup penelitian yang akan penulis kembangkan sesuai dengan keilmuan pada Program Studi Pembangunan dan Pemberdayaan. Penulis hanya membatasi lingkup magang pada dimensi bina manusia, bina uusaha, bina lingkungann, dan bina keleembagaan sesuai dengaan konsep pemberdayaan dari Totok Mardikianto.

1. **Fokus Magang**

Berdasarkan ruangdlingkup yang dikemukakan, maka penulis membatasi rencana fokus magang yang meliputi;

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pengolahan ikan laut di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pengolahan ikan laut di Kecamatan Kampung Melayu?
3. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Bengkulu dalam hal ini Dinas Koperasiddan Usaha Mikro KecildMenengah untuk memberdayakan masyarakat nelayan melalui pengolahan ikan laut?
4. **Lokasi Magang**

Kota Bengkulu merupakan daerah pesisir dengan mata pencaharian rata-rata sebagai nelayan.Oleh karena itu, lokasi magang ini akan dilaksanakan di Kota Bengkulu khususnya di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bengkulu.

1. **Maksud Dan Tujuan Magang**
2. **Maksud Magang**

Pelaksanaan magang ini dilakukan untuk memperoleh data, informasi tentang dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Pengolahan Ikan Laut di Kecamatan Kampung Melayu oleh Dinas Koperasisdan Usaha MikrosKecil Menengah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

1. **Tujuan Magang**

Selanjutnya, tujuan yang dicapai dalam magang ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pengolahan ikan laut di Kecamatan Kampung Melayu.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pengolahan ikan laut di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bengkulu.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bengkulu dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pengolahan ikan laut.
4. **Kegunaan**
   * + 1. Bagi Pemerintah Daerah, sebagai sumbangan dan masukan bagi pemerintah Kota Bengkulu khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.
       2. Bagi Lembaga IPDN, Hasil dari magang ini dapat memberikan sumbangan bagi lembaga IPDN sebagai salah satu bahan referensi kepustakaan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang menunjang kegiatan perkuliahan maupun pelatihan bagi praja IPDN dan menjadi bahan untuk pelaksanaan magang selanjutnya.
       3. Bagi Praja IPDN, hasil dari magang ini sebagai media belajar yang memberikan pemahaman, pengalaman, dan pengetahuan untuk mempersiapkan diri terjun ke lapangan kerja nanti.

**METODE MAGANG**

1. **Desain Magang**

Dalam proses penelitian, peneliti menggunakan teknik atau cara penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian serta memaparkan gambaran hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis pada kegiatan magang kali ini adalah observasi dan wawancara sebagai data primer sedangkan dokumentasi sebagai data skunder.

1. **Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan tiga tahapan, yaitu:

1. **Reduksi Data**

Mereduksi data berarti menyingkat, menyaring hal-hal yang pokok, memusatkan pada hal-hal yang penting, serta mencari pola dan temanya serta menganalisis data dengan suatu pola analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan, dan mengelompokkan data, sehingga kesimpulan akhir dapat diambil dan disajikan serta diverifikasi.

1. **Display Data**

Setelah proses reduksi data dilakukan, maka proses kedua yaitu menyajikan data. Dalam analisa kualitatif, penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan lain-lain. Dalam hal ini Mulyadi (2014:193) mengatakan bahwa “display data ialah mengolah data yang dari informan untuk disajikan agar dapat disusun dalam sebuah katagori, sesuai tema-tema yang telah digali dalam wawancara dengan informan”.

Display data yang sering dilakukan dalam penelitian kualitatif yakni data-data yang bersifat narasi. Dengan membuat penyajian data, maka akan mempermudah peneliti untuk memahami serta mempelajari apa yang terjadi, serta merencanakan kerja kemudian berdasarkan apa yang telah dipahami oleh peneliti.

1. **Verifikasi Data**

Setelah penyajian data, langkah berkutnya yaitu menarik kesimpulan-kesimpulan berdasarkan temuan-temuan data dalam penelitian serta melakukan verifikasi data.

**PEMBAHASAN**

1. **Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pengolahan Ikan Asin**

Pemberdayaan masyarakat nelayan dalam hal ini melalui pengolahan ikan laut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan yang kurang berdaya. Dalam pembangunan ekonomi nasional, peningkatan sumber daya manusia merupakan salah satu cara yang harus dilakukan dan dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan kreatif. Salah satunya adalah masyarakat nelayan.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pengolahan ikan laut yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bengkulu sedang berlangsung . Hal tersebut terlihat dari semakin meningkatnya jumlah masyarakat pengolahan ikan laut dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 jumlah pelaku usaha pengolahan ikan asin di Kota Bengkulu terdaftar sebanyak 435 orang dari tahun sebelumnya sebanyak 400 orang serta diiringi oleh peningkatan konsumsi ikan oleh masyarakat Kota Bengkulu pada tahun 2017 sebesar 42,62 kg/kapita/tahun, artinya setiap penduduk Kota Bengkulu mengkonsumsi 42,62 kg ikan per tahun. Angka tersebut mencapai 101,01% dari target yang telah ditetapkan sebesar 41,83 kg/kapita/tahun[[11]](#footnote-11)dibandingkan dengan konsumsi ikan laut oleh masyarakat Kota Surabaya pada tahun 2017 sebesar 31,07 kg/kapita/tahun, artinya setiap penduduk Kota Surabaya mengkonsumsi 31,07 kg ikan per tahun[[12]](#footnote-12)

Dengan memperhatikan bantuan yang diberikan dari instansi pemerintah terkait, usaha kecil menengah menjadi alternatif yang sangat penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat ,karena sangat berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan agar menjadi penopang kehidupan yang mandiri dan menjadi kekuatan tersendiri bagi masyarakat untuk mempertahankan kehidupannya, serta diharapkan dapat memperluas bagi para wirausaha dan penyerapan tenaga kerja.

Namun dalam perkembangan di Indonesia, usaha kecil menengah khusunya daerah Kota Bengkulu memiliki kekurangan dari segi modal, pemasaran, dan perizinan. Untuk itu sangat diperlukan pihak instansi terkait dari pemerintah terkhususnya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bengkulu sebagai pelaksanaan pembinaan secara langsung dalam memberdayakan masyarakat nelayan melalui pengolahan ikan laut. Pemberdayaan ini ada beberapa aspek yang dianalisis meliputi 4 Bina yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, Bina Kelembagaan

1. **Hambatan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Pengolahan ikan Laut** 
   * + 1. Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Rendah

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal yang penting dalam produksi dan pengelolaan produk pengolahan ikan laut.

* + - 1. Faktor Modal

Modal adalah hal yang klasik yang akan selalu ada pada setiap kesempatan sekelompok orang yang membicarakan permasalahan kegiatan perekonomian, baik itu pada tingkat besar, sedang, kecil, rumah tangga maupun mikro.

* + - 1. Bantuan Dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Belum merata

Menurut hasil pengamatan penulis, bahwa bantuan yang diberikan kepada masyarakat nelayan belum merata sehingga hanya beberapa pelaku usaha saja yang mendapatkan bantuan baik berupa pelatihan maupun alat-alat produksi.

4. Faktor Perizinan

Salah satu faktor yang menyebabkan tidak semua masyarakat nelayan mendapat bantuan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bengkulu dikarenakan tidak semua masyarakat nelayan yang memiliki Izin Usaha Kecil Menengah, hal ini yang menyebabkan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bengkulu tidak dapat memberikan bantuan kepada masyarakat nelayan tersebut.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **Kesimpulan**

Konsep Mardikanto (2013) pada empat indikator pemberdayaan yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, Bina Kelembagaan maka laporan magang ini menemukan:

1. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pengolahan ikan laut oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bengkulu, secara umum belum berjalan secara maksimal, dilihat dari:
   1. Bina Manusia

Pihak yang melakukan pelatihan dan pendidikan tidak sesuai dengan bidangnya sehingga kurang berjalan secara maksimal untuk memberdayakan masyarakat nelayan.

* 1. Bina Usaha

Memberikan Bantuan sarana dan prasarana penunjang dalam produksi tampak kurang merata tanpa penyesuaian kebutuhan nelayan.

* 1. Bina Lingkungan

Tingkat kesadaran masyarakat nelayan akan pelestarian

lingkungan masih kurang karena masyarakat nelayan membuang

limbah sembarangan.

* 1. Bina Kelembagaan

Pembuatan perizinan yang dipersulit.

1. Faktor penghambat dan pendukung dalam pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pengolahan ikan laut yaitu :
2. Faktor penghambat

* Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah
* Faktor modal yang kurang dari Dinas
* Bantuan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu yang belum merata
* Faktor perizinan untuk usaha.

1. Faktor pendukung

* jumlah bahan baku cukup besar dan murah
* letak penjualan yang strategis
* Peraturan Daerah yang mendukung pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pengolahan ikan laut.

1. Upaya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bengkulu dalam Memberdayakan Masyarakat masyarakat nelayan melalui pengolahan ikan laut yaitu:
   1. Melakukan Pelatihan dan Pendidikan
   2. Membantu dalam Promosi dan pemasaran
   3. Memberikan Bantuan sarana dan prasarana penunjang dalam produksi
   4. Mempermudah dan Mensosialisasikan Pembuatan Perizinan

**2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas dan berdasarkan hambatan yang penulis temukan dilapangan berkaitan dengan Pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pengolahan ikan laut Oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bengkulu agar meningkatkan Bina manusia melalui program pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat nelayan, Bina Usaha melalui bantuan sarana dan prasarana yang merata, Bina Lingkungan melalui sosialisasi terhadap pencemaran lingkungan, dan Bina Kelembagaan melalui perizinan yang dipermudah.
2. Bagi masyarakat nelayan pengolahan ikan laut agar mendaftarkan usahanya kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bengkulu, agar mempunyai Izin Usaha Kecil Menengah, sehingga terdata dan dapat diberikan bantuan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bengkulu.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pengolahan ikan laut di Kecamatan Selebar agar dapat membandingkan dengan hasil penelitian pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pengolahan ikan laut di Kecamatan Kampung Melayu.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku-Buku**

Anwas, Oos M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat* *di Era Global.* Bandung: Alfabeta.

*Creswell, Jhon W. 2013. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Mixed.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hubeis, Musa. 2009. *Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkunator Bisnis.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Huraerah, Abu. 2007. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat.* Bandung: Humaniora..

Mardalis. 2009. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik.* Bandung: CV. Indra Prahasta.

Nazir, M. 2011. *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia..

Rahardjo, M. Dawam. 1997. *Pembangunan Ekonomi Nasional.* Jakarta: PT.Intermasa.

Roesmidi, H dan R. Risyanti. 2008. *Pemberdayaan Masyarakat.* Sumedang: Al Qaprint Jatinangor.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Administrasi.* Bandung: Alfabeta.

….……… 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Subandi. 2014. *Ekonomi Pembangunan.* Bandung: Alfabeta.

Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat.* Jakarta: Citra Utama

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)

Theresia, Aprilia dkk. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat.* Bandung: Alfabeta.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah.

Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penulisan Laporan Akhir dan Skripsi Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Akademik 2017/2018.

**C. SUMBER LAIN**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu [*http://perindagkotabengkulu.blogspot.co.id/*](http://perindagkotabengkulu.blogspot.co.id/) Diakses Jum’at, 5 Oktober 2018

Perkembangan Jumlah UMKM Di Indonesia Tahun 2017 *Lisubisnis.com* Diakses Jum’at, 5 Oktober 2018

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2016-2018* Diakses Senin, 15 Oktober 2018

*Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bengkulu, 2016* Diakses Sabtu, 20 Oktober 2018

*Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu, 2014* Diakses Senin, 15 Oktober 2018

1. <https://www.zonareferensi.com/kondisi-geografis-indonesia/> [↑](#footnote-ref-1)
2. Deddy Supriady, Bratakusumah & Dadang Solihin. 2004*. Otonomi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. [↑](#footnote-ref-2)
3. <http://www.depkop,.go.id/uploads/tx_rtgfiles/01._Paparan_Sekretaris_Kementerian_KUKM_02.pdf> [↑](#footnote-ref-3)
4. Murtyoso, Cahyo Hatta. 2015. *Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Berbasis Komunitas* Sumedang: Institut Pmerintahan Dalam Negeri [↑](#footnote-ref-4)
5. R. Bintarto 1977:25 [↑](#footnote-ref-5)
6. <http://www.bppp--tegal.com/web/index.php/2017-08-26-04-36-53/manajemen/579-struktur-sosial-dan-ekonomi-masyarakat-nelayan> [↑](#footnote-ref-6)
7. Rosidin, Utang. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia. [↑](#footnote-ref-7)
8. [https:/;//id.wikipedia.org/wikiii/Daftar-Kabupaten-dan-Kota-di-Indonesia-menurut-IPM](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Kabupaten_dan_Kota_di_Indonesia_menurut_IPM) [↑](#footnote-ref-8)
9. <https://kota>bengkuludalamangka/kecamatankampungmelayuIPM [↑](#footnote-ref-9)
10. <https://ekonomi.kompas.com/read/2016/04/08/070000726/Nelayan.Menjerit.Kekurangan.Bahan.Baku.Pengolahan.Ikan.Ini.Jalan.Keluar.dari.KKP> [↑](#footnote-ref-10)
11. *Dinas Kelautan. Dan .Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2017* [↑](#footnote-ref-11)
12. *Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2017* [↑](#footnote-ref-12)